

BAB IV

PARADIPLOMASI PENDIDIKAN DAN INVESTASI NTB: RASIONALITAS DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB

Merupakan hal yang tidak bisa dirahasiakan bahwa di balik setiap keputusan yang diambil baik oleh individu ataupun organisasi, atau yang dalam hal pemerintahan sering disebut dengan kebijakan, ada faktor-faktor tertentu yang dapat dikatakan menjadi latar belakang diambilnya sebuah keputusan atau lebih. Terlebih lagi, semakin berpengaruh keputusan tersebut terhadap kehidupan bermasyarakat, akan semakin banyak pihak yang berperan dalam diambilnya keputusan tersebut. Dalam suatu sistem pemerintahan yang menganut sistem demokrasi, setidaknya ada tiga lembaga pemerintahan yang menentukan jalannya suatu kebijakan, yaitu legislatif (pembuat dan penentu kelayakan kebijakan), eksekutif (pelaksana kebijakan), dan yudikatif (pengawas jalannya kebijakan) (Saunders & Le Roy, 2012) dan sistem ini tidak hanya berlaku pada tingkat nasional, namun juga provinsi sebagai sistem yang tepat berada satu tingkat di bawah pemerintah pusat, terutama dalam sistem negara republik. Dalam kasus Indonesia sebagai negara republik, pemerintah provinsi berada tepat satu tingkat di bawah pemerintah pusat; hal ini menjadi dasar pemerintah provinsi juga dikenal sebagai “pemerintah tingkat I” yang disusul oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai “pemerintah tingkat II” dan seterusnya.

Sebagai provinsi yang diberikan hak otonomi daerah oleh pemerintah pusat, provinsi Nusa Tenggara Barat secara langsung mendapatkan hak untuk mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk memajukan daerah secara ekonomi, sosial, politik, budaya, dan

kepentingan lainnya selama tidak bertentangan atau melangkahi kepentingan dan posisi pemerintah pusat sebagai institusi utama dalam suatu negara (Rasyid, 2007). Salah satu bentuk urusan yang merupakan hak dari pemerintah daerah adalah hak untuk melaksanakan hubungan kerja sama dengan pihak luar negeri; tren ini muncul akibat adanya pengaruh berkembangnya tren internasional yang sering dikenal dengan paradiplomasi (Schiavon, 2019) menurut para ahli hubungan internasional kontemporer. Setidaknya ada tiga tujuan dasar dibentuknya suatu hubungan paradiplomasi oleh satu daerah dengan daerah lain di luar batas negara menurut Mukti (2013), yaitu murni tujuan ekonomi (memajukan perekonomian daerah), *multipurpose* (tujuan ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dll.), dan identitas politik wilayah (ekspresi suatu identitas nasional wilayah yang spesifik, otonom, dan berbeda dari daerah lainnya). Selain ketiga aspek tersebut, beberapa aspek lain juga bermunculan seiring waktu dengan adanya pergantian pemimpin suatu daerah, perbedaan isu yang ada, dan masalah lainnya yang tergabung dalam sistem rasionalitas.

A. TEORI PILIHAN RASIONAL DALAM KEBIJAKAN PARADIPLOMASI DAERAH

Analisis rasional secara umum dapat diartikan sebagai penilaian logis, valid, handal, dan diuji secara empiris, dan berdasarkan fakta; Warsito (2017) kemudian melanjutkan penjelasan mengenai rasionalitas suatu keputusan yang diambil oleh manusia bahwa konteks dan situasi yang berbeda menuntut rasionalitas yang berbeda. Penulis menginterpretasikan penjelasan ini sebagai sebuah kondisi di mana gabungan berbagai faktor, di antaranya adalah pribadi penentu keputusan, situasi yang dihadapi, instrumen yang tersedia, pengaruh

yang timbul akibat diambilnya keputusan, dan berbagai faktor lainnya, dapat memengaruhi keputusan akhir yang diambil. Berpikir rasional merupakan salah satu karakteristik alami yang idealnya dimiliki oleh setiap manusia (Tillyer, 2011) dan, menurut pengertian filsafat, teori rasional merupakan pelaksanaan alasan, yaitu cara orang menarik kesimpulan ketika mempertimbangkan hal-hal yang bersifat sengaja. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa pengertian rasionalitas atau teori rasional bisa berbeda pada setiap disiplin ilmu; meskipun istilah “rasionalitas” atau “teori rasional” sering dipergunakan pada diskusi ilmu ekonomi, sosiologi, psikologi, dan politik, masing-masing memiliki penafsiran tersendiri terhadap apa yang disebut dengan kedua istilah di atas.

Dalam ilmu politik, teori tentang rasionalitas manusia yang sering dibahas lebih dikenal sebagai teori pilihan rasional (*rational choice theory*), yaitu teori yang menekankan “keinginan lebih banyak” dari manusia yang mengindikasikan upaya pencapaian maksimal atas suatu tindakan tanpa kalkulasi baik-buruk (Warsito, 2017) secara mendalam. Maksud dari penjelasan ini adalah pada proses suatu pengambilan keputusan politik, faktor untung-rugi setiap alternatif keputusan menjadi hal yang menentukan pilihan akhir yang akan diambil. Ada tiga asumsi dasar dari teori pilihan rasional (Warsito, 2017), yaitu:

- Kesempurnaan/kelengkapan, yaitu semua alternatif diurutkan berdasarkan prioritas;

- Transitifitas, yaitu setiap alternatif bisa dibandingkan dengan yang lain (A lebih baik dari B, B lebih baik dari C, maka A lebih baik dari C); dan
- Independensi dari alternatif yang relevan, yaitu telah terpilih A dalam kelompok pilihan (A,B) namun muncul alternatif baru (X), B tidak akan pernah lebih dari A.

Dalam pengambilan suatu keputusan politik menurut teori pilihan rasional, ada setidaknya dua aktor utama yang berperan dominan dalam mengambil keputusan yang berlaku dalam suatu lingkup politik (nasional, regional, dll.) dan relevan untuk tesis ini, yaitu pribadi (personal/figur karismatik) dan organisasi birokratis (otoritas legal rasional). Dalam kasus pribadi sebagai aktor rasional utama, pengaruh “karisma” seorang individu yang dianggap sebagai pemimpin dan inspirasi masyarakat dapat menentukan jalan suatu kebijakan, dari pembuatan maupun pelaksanaan. Meskipun kaitannya erat dengan figur teologi (keagamaan) seperti nabi (*prophet*), rasul (*messenger*), orang suci (*saint*), dan figur-figur lainnya yang dipercaya masyarakat sebagai individu yang diberikan kemampuan khusus melebihi manusia lainnya oleh kekuasaan ilahi atau memiliki pengetahuan dan kedekatan lebih dengan ilahi, dalam konteks Islam oleh Allah (Warsito, 2017), tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini ada karakter lain yang penulis amati bagi masyarakat sebagai penentu apakah seorang manusia atau individu dapat menjadi inspirasi dan panutan, yaitu latar belakang keluarga (*hereditary background*), pendidikan (*education*), kontribusi terhadap masyarakat (*contribution*), dan karakter lainnya.

Entitas kedua adalah otoritas legal rasional yang terwujud dalam organisasi birokrasi yang, menurut Weber, tidak dianggap sebagai entitas tidak efisien, boros, dan tidak rasional lagi seperti yang dituduhkan oleh beberapa peneliti, dan malah terkesan lebih efisien, sistematis, dan dapat diramalkan jika dibandingkan dengan birokrasi-administrasi kuno pada periode monarki/kerajaan yang penuh akan sarat keluarga (*extended family*) dan hubungan pribadi (Warsito, 2017). Hal ini bukan berarti bahwa sistem rasional yang dimiliki oleh birokrasi tidak memiliki kelemahan; menurut Tocqueville (Elster, 1986), kelemahan ini terdapat pada koordinasi mengenai detail suatu rencana, menjaga rahasia, dan pelaksanaan tanpa ragu walaupun di hadapan tantangan terbesar sekalipun. Akan tetapi, kelebihan yang ditawarkan oleh sistem birokrasi terletak pada kemampuannya untuk menjalankan suatu rencana dalam jangka waktu yang lebih panjang dari sistem aristokrasi (pribadi) dan mampu memobilisasi kekuatan dan potensi rakyat secara maksimal.

Sebagai solusi pertarungan tanpa akhir antara mana yang lebih berpengaruh dan efektif dalam pengambilan suatu keputusan rasional, beberapa pelaksana politik menawarkan solusi yang penulis anggap cukup relevan terhadap kondisi politik hampir di setiap negara demokrasi di seluruh dunia, yaitu koeksistensi antara karakter karismatik dan sistem birokrasi dalam membentuk suatu kebijakan. Kedua entitas ini berusaha menghilangkan kebiasaan tradisional “kami selalu berbuat begitu” atau “biasanya begitu” dan bereksperimen dalam mencari solusi suatu isu yang terus muncul dan berkembang di masyarakat yang mereka pimpin tanpa membuat isu semakin besar atau saling menghancurkan pengaruh masing-masing. Menurut Weber, ada beberapa norma dan prinsip yang

dijalankan dalam suatu dominasi atau otoritas hukum (Warsito, 2017), yaitu:

- Norma umum dibentuk berdasarkan perjanjian;
- Hukum adalah sistem yang konsisten dan dibuat secara sadar dari aturan-aturan yang dasarnya adalah hal abstrak;
- Ketaatan terhadap hukum pada setiap entitas, termasuk para pemimpin atau superior;
- Keputusan hukum harus berdasar kepada *rule of law*;
- Kepatuhan terhadap pemimpin tidak murni seperti itu, melainkan merupakan ketertiban impersonal dan birokrasi adalah bentuk nyata dari dominasi hukum yang berlaku.

Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, manusia memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional karena karakter ini merupakan karakter dasar dari manusia, setidaknya bagi penulis, yang memiliki kesehatan mental yang “normal dan setiap disiplin ilmu memiliki pengertian yang berbeda terhadap rasionalitas dan teori pilihan rasional. Dalam konteks tesis ini, pendekatan teori pilihan rasional yang paling relevan dalam menjawab pertanyaan “Faktor-faktor apa yang mendorong pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memfokuskan paradiplomasi pada sektor pendidikan?” adalah teori pilihan rasional dalam tingkat pemerintahan lokal (*local government*) yang diterangkan oleh Merilee S. Grindle. Menurut Grindle (2009), penerapan teori pilihan rasional dalam lingkup pemerintahan lokal berfokus pada pengaruh desentralisasi yang mendorong pengambilan keputusan seperti yang

telah disebutkan sebelumnya. Dalam konteks ini, kualitas rasionalitas pemerintahan daerah dipengaruhi secara signifikan oleh kemampuan kewiraswastaan (*entrepreneurship*) dari pemimpin terpilih daerah tersebut di tengah kompetisi politik di semua daerah dalam suatu negara. Pada proses desentralisasi atau yang lebih dikenal oleh pengampu posisi penting politik di Indonesia sebagai otonomi daerah, tantangan baru pengelolaan sumber daya (*resources management*) dan kesempatan yang dimiliki oleh daerah menuntut pemimpin terpilih daerah untuk memanfaatkan relasi pribadi masing-masing dan menciptakan suatu perubahan dalam pengelolaan hubungan antar entitas dalam daerah yang diharapkan bernilai positif dalam tempo yang singkat; hal ini dikarenakan kekhawatiran akan keberadaan institusi yang lemah yang dapat menghambat atau bahkan membahayakan kecepatan reformasi dalam pemerintahan daerah. Grindle kemudian melanjutkan bahwa isi kebijakan yang diambil harus memerhatikan lima hal: jenis manfaat, derajat perubahan yang dikehendaki, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, dan sumber daya yang dihasilkan; konteks implementasi pun harus memerhatikan pada: kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap (Wibawa, 1994). Hal ini menunjukkan bahwa salah satu faktor penentu dari pengambilan keputusan rasional adalah keberhasilan implementasi kebijakan yang dipilih dan hal ini dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.

Gerald E. Sussman (1980) menambahkan penjelasan Grindle mengenai teori pilihan rasional dalam tingkat pemerintahan daerah mengenai proses pengambilan keputusan rasional pada level “akar rumput” (*grassroots*) yang pada waktu mendesak pada masa *Pilot*

Project di India pada pertengahan abad ke-20 (tahun 1940-1950an) yang ditandai dengan keputusan sadar oleh pemerintah India untuk tidak mengambil tindakan yang berkarakter pelan, hati-hati, berperforma tinggi, dan beroperasi dengan unit kecil. Di tengah tuntutan masyarakat kelas bawah India yang menaruh harapan besar mengenai perbaikan taraf hidup daerah pertanian terhadap para politisi di India, terutama Nehrudan Gandhi sebagai pemimpin India pada saat itu serta pengikut mereka, pemerintah India pada pemerintahan Nehrudan Gandhi mendorong diri mereka sendiri untuk “berjalan lebih cepat” dan merekrut sebanyak mungkin orang untuk menjalankan proyek pembangunan *Pilot Project*. Walaupun proyek ini dianggap berhasil oleh banyak pihak di India maupun USAID sebagai pemberi bantuan pembangunan, model *Pilot Project* segera dihentikan oleh pihak yang sama yang mencanangkan program tersebut (Nehru, V. T. Krishnamachari dari Komisi Pembangunan, dan S. K. Dey sebagai ketua *Community Project Administration*) demi membentuk program rekonstruksi daerah pertanian baru yang lebih luas dan pesat. Hal ini secara tidak langsung menandakan bahwa pengambilan keputusan secara rasional diharapkan dapat memberikan dampak positif secara maksimal dalam tempo singkat namun tidak ditujukan untuk jangka panjang.

B. FAKTOR PENDORONG PARADIPLOMASI PENDIDIKAN DAN INVESTASI NUSA TENGGARA BARAT

Dalam proses pengambilan suatu keputusan politik yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat, perencanaan yang matang dan ketepatan keputusan tersebut dalam menyelesaikan suatu isu yang muncul menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan suatu keputusan dan secara langsung juga memengaruhi kredibilitas seorang pemimpin

atau institusi pemerintahan dalam mengemban tugasnya di masa mendatang. Perencanaan yang matang berasal dari analisis isu yang tepat; hal ini mencakup pertimbangan kelebihan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan (SWOT) dari pilihan kebijakan dalam menghadapi isu, untuk siapa/apa kebijakan ini ditujukan, berapa lama kebijakan ini akan dijalankan, penyebab munculnya isu yang ada, dan banyak pertimbangan lainnya. Ada kalanya dalam proses pengambilan keputusan, pembuat atau penentu kebijakan hanya memiliki waktu yang lebih sedikit dari biasanya dengan solusi yang juga harus segera ditawarkan kepada masyarakat dan dijalankan, lengkap dengan risiko yang kemungkinan dihadapi. Menurut teori pilihan rasional yang telah dijelaskan sebelumnya, seorang manusia, dalam hal ini pembuat kebijakan, akan sangat mungkin menghadapi situasi ini dan secara rasional pasti akan bertumpu pada suatu pilihan yang memiliki keuntungan lebih banyak daripada kerugian yang ada.

Merespons kebijakan paradiplomasi pendidikan dan investasi yang diambil oleh Dr. Zulkieflimansyah sebagai gubernur provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2018-2023 khususnya rencana *sister province* antara Nusa Tenggara Barat dan Kujawsko-Pomorskie yang penjabarkannya dimulai pada Oktober 2018, penulis meyakini bahwa ada alasan yang lebih konkret dan khusus bagi Dr. Zul sehingga beliau memilih menambahkan opsi sektor pendidikan dan investasi pada kebijakan paradiplomasi yang ada dan lebih dari sekedar pemenuhan janji kampanye saat Pemilukada NTB 2018 silam (Radar Lombok, 2018). Berdasarkan pengamatan penulis selama penelitian lapangan di provinsi Nusa Tenggara Barat pada awal November 2019, faktor-faktor pendorong pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode

pemerintahan Dr. Zulkieflimansyah memfokuskan program paradiplomasi pada sektor pendidikan dan investasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu eksternal dan internal. Faktor-faktor tersebut banyak berasal dari kondisi global, nasional, dan regional yang baik secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kehidupan masyarakat NTB, ambisi pribadi, dan perjuangan identitas NTB di mata internasional. Meskipun beberapa dari alasan yang dipaparkan terkesan tidak bebas nilai (*value-oriented*), ada indikasi bahwa faktor-faktor pendorong tersebut cukup kuat sehingga mendorong pembentukan kebijakan yang ada.

1. Faktor Eksternal Pendorong Kebijakan Paradiplomasi Pendidikan NTB

Situasi yang terjadi di luar daerah secara geografis maupun yurisdiksi, walaupun tidak berpengaruh secara langsung, dapat menjadi faktor pendorong terbentuknya suatu kebijakan. Terlebih lagi, adanya kebijakan paradiplomasi yang dibentuk dan dilaksanakan oleh suatu daerah secara implisit menandakan sudah terbentuknya hubungan interdependensi antar aktor hubungan transnasional dan adanya niat dari suatu pelaksana pemerintahan di daerah untuk terintegrasi dengan dunia global. Dalam situasi ini, bukan hanya kepentingan, pengaruh, kesempatan, dan keuntungan yang dibagikan secara luas kepada masyarakat dunia, namun juga isu dan masalah yang tidak kalah berpengaruhnya dari seluruh nilai positif yang ada, khususnya dalam hubungan yang bersifat politik (Gottowik, 2010).

Dalam kasus paradiplomasi pendidikan dan investasi provinsi Nusa Tenggara Barat, faktor ekonomi dan politik global dan regional Asia Tenggara memiliki keterikatan tersendiri terhadap dibentuknya kebijakan ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang ada di dalam lingkup provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, keseluruhan dari narasumber menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) provinsi Nusa Tenggara Barat melalui peningkatan potensi pemuda NTB melalui pendidikan dan perjuangan untuk mendiasporakan generasi muda NTB untuk menjadi penggerak kemajuan ekonomi, sosial, budaya, dan politik dunia. Akan tetapi, narasumber belum berhasil memaparkan adanya faktor eksternal yang tidak kalah berpengaruh dari kondisi internal yang ada dan untuk menjawab kekurangan ini, pemerintah provinsi telah sebelumnya menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023 yang di mana faktor-faktor eksternal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

Perjanjian antar negara anggota Asosiasi Negara Asia Tenggara atau ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) yang dilaksanakan pada KTT ASEAN tahun 1997 menandakan lahirnya suatu inisiasi integrasi ekonomi yang diimpikan oleh para pemimpin negara anggota ASEAN, yaitu Masyarakat ASEAN atau *ASEAN Community* yang terdiri dari Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA/AEC), Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (ASCC) dan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC); Masyarakat ASEAN dan ketiga pilarnya merupakan upaya negara anggota ASEAN dalam mewujudkan Visi ASEAN 2020 (*ASEAN Vision 2020*) (Association of Southeast Asian Nations, 2015). Pada tahun 2015, para pimpinan negara anggota ASEAN setuju untuk mulai meningkatkan kesiapan negara masing-masing dalam mengikuti perkembangan, memanfaatkan kesempatan, menghadapi persaingan ekonomi-politik serta sosial-budaya antar negara anggota dan negara luar anggota, dan menghadapi ancaman keamanan dari luar kawasan ASEAN. Pertemuan lain yaitu Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) Summit di Malaysia pada tahun 2006 menerangkan cetak biru integrasi ASEAN yang bentuk integrasi ekonomi (AEC) yang terdiri dari empat poin, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019) dan ini dapat dikatakan menjadi faktor eksternal utama pembentukan kebijakan paradiplomasi pendidikan provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibahas pada tesis ini.

Seperti halnya kebijakan lain yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, setiap kebijakan yang disahkan dan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB ditujukan untuk menyiapkan seluruh masyarakat NTB dalam menghadapi kemungkinan adanya arus pekerja serta produk dari

luar negeri yang cukup deras sehingga dikhawatirkan bahwa ketidakmampuan masyarakat dan produk andalan provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bersaing dengan kekuatan asing dalam segi kualitas dan kuantitas serta kualifikasi lain yang diperlukan dalam kompetisi ini dapat berdampak buruk tidak hanya terhadap perekonomian NTB, namun juga Indonesia sebagai negara dan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi NTB menyadari risiko ini dan menekankan hal-hal yang harus dilaksanakan agar masyarakat serta sumber daya NTB dapat bersaing secara adil dalam MEA, di antaranya adalah: (i) peningkatan kualitas dan daya saing produk unggulan daerah, (ii)endorongan peningkatan investasi di sektor-sektor unggulan daerah yang dapat menciptakan nilai tambah, (iii) peningkatan mutu dan daya saing manusia baik dari sisi pendidikan maupun keterampilan, (iv) penyediaan infrastruktur dan sara-prasarana pendukung, dan (v) peningkatan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019).

- Tuntutan Pemenuhan *Sustainable Development Goals* (SDG) PBB

Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations Organization* (UNO atau UN), Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menyetujui target pembangunan berkelanjutan atau yang banyak dikenal oleh banyak kalangan sebagai *Sustainable Development Goals* atau *SDG* yang merupakan lanjutan dari program *Millenium Development Goals* atau *MDG* yang terdiri dari 8 tujuan, 16

target, dan 67 indikator yang telah dianggap selesai oleh PBB pada tahun 2015. Sebagai kelanjutan dari *MDG*, *Sustainable Development Goals* atau *SDG* direncanakan dapat terpenuhi pada tahun 2030 yang di mana 189 negara anggota PBB setuju akan 17 tujuan (*goals*) dan 169 sasaran (*targets*) yang telah dibahas dan akan dilaksanakan sesegera mungkin demi terwujudnya kemaslahatan bersama yang diharapkan oleh para pemimpin dunia yang tergabung dalam PBB. Ada pun 17 *goals* yang telah disetujui terdiri dari (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019):

Gambar 4.1: 17 Sustainable Development Goals PBB



Sumber: United Nations Organization (2015)

- (i) Tanpa Kemiskinan (*No Poverty – End poverty in all of its forms everywhere*),

- (ii) Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger – End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture*),
- (iii) Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-Being – Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*),
- (iv) Pendidikan Berkualitas (*Quality Education – Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning*),
- (v) Kesetaraan Gender (*Gender Equality – Achieve gender equality and empower all women and girls*),
- (vi) Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and Sanitation – Ensure access to water and sanitation for all*),
- (vii) Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy – Ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all*),
- (viii) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth – Promote inclusive and sustainable economic growth, employment and decent work for all*),
- (ix) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (*Industry, Innovation, and Infrastructure – Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization, and faster innovation*),
- (x) Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities – Reduce inequality within and among countries*),

- (xi) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities – Make cities inclusive, safe, resilient, and sustainable*),
- (xii) Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan (*Responsible Consumption and Production – Ensure sustainable consumption and production patterns*),
- (xiii) Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action – Take urgent action to combat climate change and its impacts*),
- (xiv) Ekosistem Lautan (*Life Below Water – Conserve and sustainably use the oceans, seas, and marine resources*),
- (xv) Ekosistem Daratan (*Life on Land – Sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss*),
- (xvi) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, Justice, and Strong Institution – Promote just, peaceful, and inclusive societies*), dan
- (xvii) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals – Revitalize the global partnership for sustainable development*).

Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia, dengan adanya persetujuan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, mendapatkan kewajiban untuk mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi ketujuh belas *goals* tersebut. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama

(2014-2019), pemerintah pusat telah menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang merupakan penjabaran Visi-Misi Presiden yaitu Nawacita dengan target SDG yang telah ditetapkan. Penyelarasan ini secara langsung bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga seluruh instansi yang bernaung di bawah pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah provinsi sebagai institusi pemerintah tingkat I yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat secara lokal maupun nasional serta global.

- Permintaan Investasi dan Penawaran Beasiswa dari Pihak Luar Negeri

Populernya tren kerja sama antar pemerintah lokal yang melewati batas negara atau yang lebih dikenal dengan istilah paradiplomasi mendorong banyak pemerintah lokal untuk mulai mencari opsi kerja sama yang lebih kreatif dan membuka peluang untuk lebih banyak pihak untuk membentuk kerja sama. Tidak jarang, suatu perjanjian kerja sama paradiplomasi yang disetujui oleh dua kota/provinsi atau lebih yang beda negara menggabungkan dua atau lebih fokus kerja sama dengan ekspektasi bahwa seluruh pihak akan diuntungkan dengan adanya kerja sama tersebut. Beberapa sektor yang sering dimanfaatkan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk menjadi fokus paradiplomasi meliputi investasi, pendidikan, pertukaran

budaya, pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran ilmu administrasi, dan sebagainya.

Dalam kasus paradiplomasi yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dan *voivodeship* Kujawsko-Pomorskie, perjanjian kerja sama yang disetujui oleh pemerintah kedua provinsi juga merupakan respons dari adanya ajakan kerja sama dari pihak luar negeri yang pastinya memiliki kepentingan tersendiri yang umumnya diwakili oleh perusahaan. Dalam periode pemerintahan Dr. Zulkieflimansyah, keputusan Dr. Zul untuk lebih mengencarkan hubungan luar negeri melalui sektor pendidikan serta investasi juga mendapat perhatian dari beberapa pihak luar yang juga ingin mengencarkan pengadaan investasi mereka di luar negeri. Selain adanya dorongan dari pemerintah dan perusahaan asing, kerja sama jalur lain juga ditempuh oleh pihak asing melalui universitas yang juga berupaya meningkatkan jaringan internasional yang dimilikinya atas berbagai kepentingan (Rahadi, 2019). Penulis berpendapat jika situasi yang pihak universitas asing hadapi secara internal kurang lebih sama dengan universitas dalam negeri Indonesia pada umumnya, seperti situasi di mana keberadaan mahasiswa asing menjadi pendorong reputasi universitas serta kepentingan akreditasi dan pengembangan pendidikan, maka penawaran beasiswa tersebut merupakan situasi *win-win* bagi kedua belah pihak.

2. Faktor Internal Pendorong Kebijakan Paradiplomasi Pendidikan NTB

Merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam berbagai tingkat, baik pusat maupun daerah, merupakan respons akan suatu situasi yang terjadi dalam masyarakat dan juga refleksi dari pandangan seorang pemimpin terhadap masalah yang terjadi akibat situasi tersebut yang disertai dengan solusi yang ditawarkan kemudian. Ada kalanya, motivasi dari suatu kebijakan juga merupakan “impian” pribadi dari pemimpin itu sendiri yang kemudian mendapat suatu persetujuan dari masyarakat yang baik secara sadar maupun tidak juga merupakan “impian” dari masyarakat sendiri. Adapun situasi ketiga adalah di mana suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan perwujudan dari dominasi suatu kelompok kepentingan atau yang sering dikenal sebagai “kepentingan partai politik”. Dalam situasi ketiga ini, partai politik merupakan “perwakilan dari suara rakyat yang kacau” dan berfungsi untuk menjalankan empat peran, yaitu sebagai lembaga pendidikan politik praktis dalam masyarakat, pemupukan dan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat, pemelihara stabilitas dan mobilisasi politik, dan fungsi perwakilan melalui sistem legislatif (Warsito, 2017).

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lembaga pendukungnya dan lembaga legislatif (DPRD NTB) merupakan satuan institusi pusat dari provinsi Nusa Tenggara Barat yang tidak dipungkiri lagi merupakan perwujudan dari ketiga aspek

tersebut di mana setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pihak pemerintah provinsi NTB merupakan perwujudan dari hubungan ketiga aspek yang ada terlepas dari hubungan ketiganya merupakan hubungan positif (saling mendukung satu sama lain) atau negatif (konflik antara satu sama lain. Penulis beranggapan bahwa keadaan ini merupakan hal yang wajar dalam negara yang berasas demokrasi yang mengizinkan aspirasi masyarakat untuk dapat diwujudkan dalam suatu kebijakan pemerintah dan kepala pemerintahan serta partai politik yang ada dan tergabung dalam lembaga legislatif berhak memiliki dan mengutarakan suara dan respons sendiri atas suatu isu yang terjadi. Selama kebijakan yang ada dapat menguntungkan semua pihak, khususnya masyarakat sebagai pihak yang memilih individu yang berada di tampuk pemerintahan lokal dan dapat memajukan kualitas perekonomian serta politik NTB, penulis akan mendukung jalannya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi NTB.

Dalam menanggapi faktor-faktor terjadinya paradiplomasi NTB dalam bidang pendidikan dan investasi, penulis menyelidiki bahwa berdasarkan keterangan dari narasumber yang ada serta beberapa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, faktor-faktor penyebab terjadinya paradiplomasi NTB dalam bidang pendidikan secara internal merupakan gabungan dari adanya agenda Indonesia ramah investasi oleh pemerintah pusat, ambisi pribadi yang disetujui oleh masyarakat, dan kondisi IPM dan partisipasi pendidikan

tinggi masyarakat NTB. Secara mendalam, penjelasan faktor-faktor internal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Agenda “Indonesia Ramah Investasi” Pemerintah Pusat Indonesia era Presiden Joko Widodo

Agenda pemerintah pusat Indonesia dalam memajukan perekonomian Indonesia melalui investasi asing merupakan sebuah praktik yang sudah berlangsung cukup lama yaitu sejak Orde Baru dengan masuknya perusahaan multinasional (*multinational corporations/MNCs*) untuk berbisnis dan menanamkan saham di Indonesia dengan mayoritas di antaranya berasal dari negara kapitalis seperti Amerika Serikat (Mukthi, 2018). Pada era modern, tingginya tuntutan kompetisi antar negara dalam memajukan perekonomian nasional serta krisis moneter global yang terakhir terjadi pada tahun 2008 (Indonesia.go.id, 2019) mendorong hampir setiap negara di dunia untuk tetap terlibat dalam perdagangan internasional baik yang langsung melibatkan pemerintahan negara maupun perusahaan yang mewakili suatu negara. Hal yang sama juga terjadi pada Indonesia di mana perekonomian Indonesia sempat “lesu” pada tahun 2012 (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2016) dan terus berlanjut.

Menanggapi fenomena tersebut, Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 memberlakukan deregulasi perizinan investasi skala besar demi memberi ruang yang lebih leluasa kepada investor lokal maupun asing untuk menanamkan modal di Indonesia, khususnya

beberapa daerah yang dikhususkan untuk proyek investasi seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan sebagainya. Sejak tahun 2016, Presiden Joko Widodo secara kontinu menekankan kepada setiap kepala pemerintahan daerah untuk mendukung agenda pemerintah pusat dalam menciptakan Indonesia “ramah investasi”. Alasan yang dikemukakan oleh pemerintah pusat atas tindakan deregulasi ini adalah investasi merupakan alternatif peningkatan ekonomi yang dipilih pemerintah Indonesia era Presiden Joko Widodo untuk memajukan perekonomian pusat dan daerah di tengah lesunya ekspor dan industri serta sumber daya lokal (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2016).

Dibanding beberapa provinsi lain di Indonesia, Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu tempat yang, walaupun terdampak oleh kebijakan nasional ini, namun memiliki lokasi strategis pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah pusat sebagai satu dari 13 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berfokus pada investasi pariwisata dan sektor lainnya dengan mengandalkan karakteristik geografis yang khas dari setiap KEK (Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia, 2019). Sebagai pihak berwenang di NTB, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan mandat untuk mengawasi jalannya proses penanaman investasi yang ada di KEK Mandalika, pulau Lombok, serta daerah lainnya di NTB. Meskipun begitu, pemerintah daerah, khususnya pemerintah Provinsi NTB, diberikan keleluasaan dalam mencari relasi dan berinovasi dalam mengundang investor lokal maupun asing

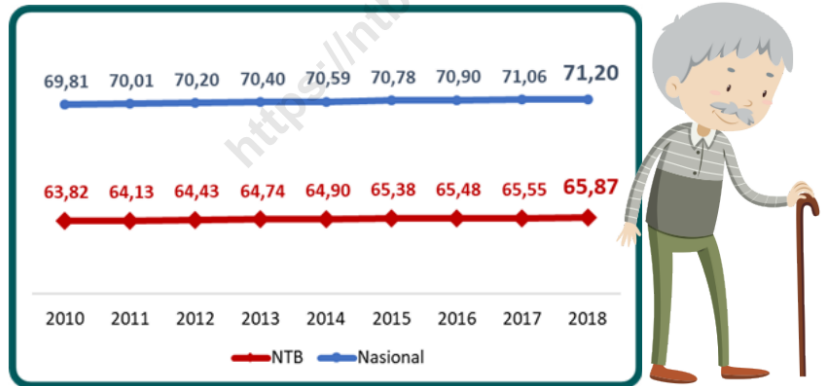
(Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2016).

- Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nusa Tenggara Barat

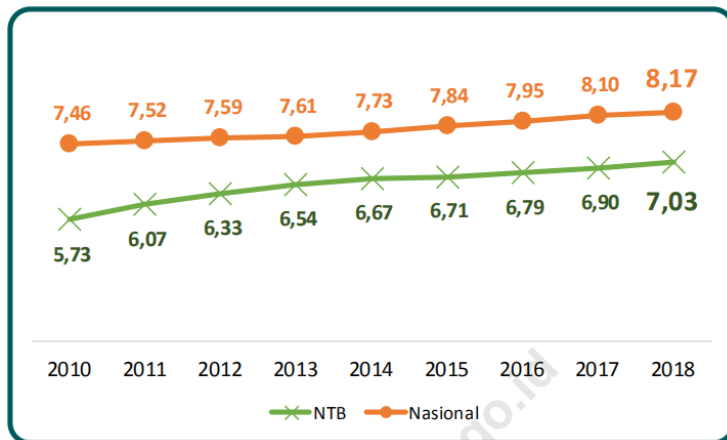
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah indikator kesejahteraan yang telah disepakati oleh banyak pihak, baik pengampu kebijakan, akademisi, maupun pemerhati kondisi sosial, untuk menentukan apakah masyarakat yang meninggalkan suatu daerah (negara, provinsi, kabupaten, dll.) telah mencapai level “sejahtera” atau belum. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (2019), ada setidaknya tiga faktor penentu IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Jika dimensi kesehatan dipertimbangkan dari umur harapan hidup, dimensi pengetahuan dinilai dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah; adapun dimensi standar hidup layak dinilai dari pengeluaran per kapita yang berdasarkan perhitungan IPM ketiganya merupakan hal yang berkesinambungan erat antara satu dan lainnya.

Dalam menentukan indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat terbaru, Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan penelitian berkaitan dengan ketiga aspek tersebut dalam delapan tahun terakhir (2010-2018) dengan hasil yang dapat ditunjukkan melalui tabel dan grafik sebagai berikut:

Grafik 4.1: Harapan Hidup Masyarakat NTB tahun 2010-2018

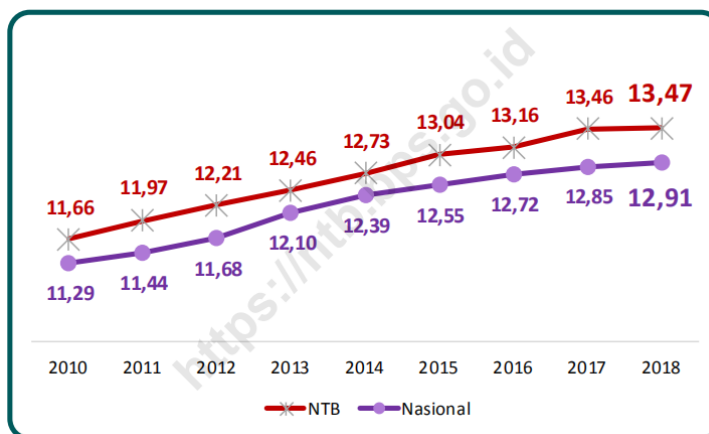


Grafik 4.2: Rata-Rata Lama Sekolah Masyarakat NTB tahun 2010-2018

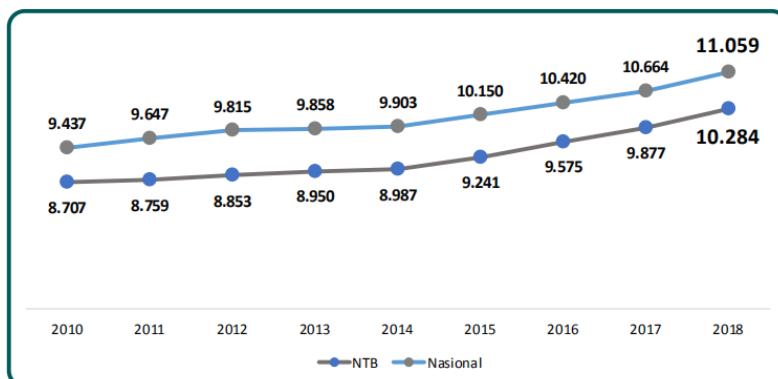


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (2019)

Grafik 4.3: Harapan Lama Sekolah Masyarakat NTB tahun 2010-2018



Grafik 4.4: Daya Beli Masyarakat NTB (dalam Rupiah) tahun 2010-2018

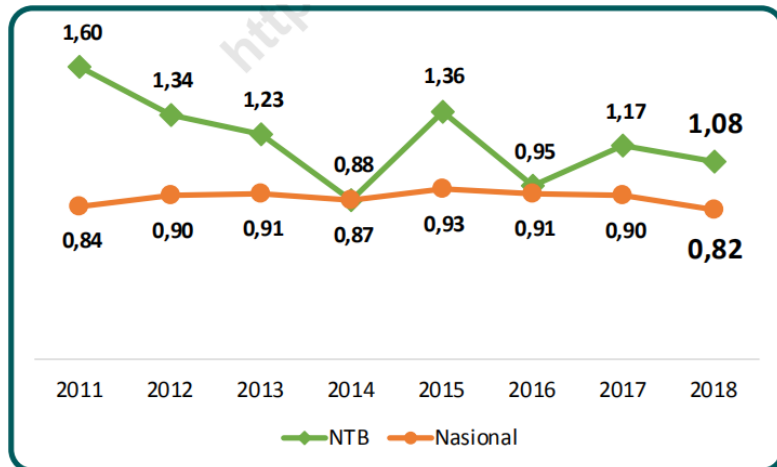


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (2019)

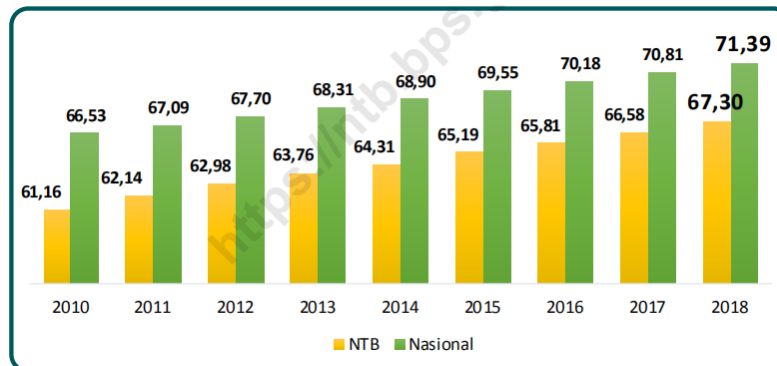
Dalam dimensi kesehatan, harapan hidup rata-rata provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dikatakan masih di bawah standar nasional selama delapan tahun terakhir dengan lama harapan hidup hanya meningkat sekitar dua tahun senilai 65,87

tahun pada tahun 2018 dari 63,82 pada tahun 2010; angka tersebut sayangnya masih berada di bawah harapan hidup rata-rata nasional dengan angka yang telah menembus batas 70 tahun (71,20) pada tahun 2018 dari sebelumnya yang hanya 69,81 pada tahun 2010. Pada dimensi pengetahuan, angka yang ditunjukkan tidak sepenuhnya buruk dikarenakan meskipun rata-rata lama sekolah masyarakat NTB yang berusia di atas 25 tahun masih di bawah standar rata-rata nasional (7,03 tahun pada tahun 2018 dan dibandingkan dengan standar nasional yang mencapai 8,17), perkembangan harapan lama sekolah peserta didik di NTB mengalami kemajuan dengan berada di atas angka 13 tahun (13,47 tahun); angka ini menunjukkan bahwa harapan lama sekolah masyarakat NTB sudah melebihi standar nasional yang mencapai 12,91 tahun. Pada dimensi perekonomian, daya beli per kapita provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengalami peningkatan dari hanya 8,707 juta rupiah per tahun pada tahun 2010 ke 10,284 juta per tahun juga pada tahun 2018; secara statistik, hal ini menandakan bahwa daya beli masyarakat NTB meningkat sekitar 1,6 juta rupiah walaupun keseluruhan angka ini belum mencapai standar rata-rata nasional yang berada di atas 11 juta per tahunnya pada tahun 2018 (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019).

Grafik 4.5: Persentase Kenaikan IPM NTB tahun 2010-2018



Grafik 4.6: Indeks Pembangunan Manusia NTB tahun 2010-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (2019)

Badan Pusat Statistik (BPS) NTB (2019) kemudian melanjutkan dengan menghitung indeks pembangunan manusia (IPM) NTB dan membandingkannya dengan IPM nasional dan mendapatkan hasil yang sedikit mengkhawatirkan: walaupun

IPM provinsi NTB terus mengalami kenaikan sebanyak 6 persen dalam jangka waktu delapan tahun (61,16 pada tahun 2010 ke 67,30 pada tahun 2018), IPM provinsi NTB masih tertinggal empat hingga lima poin dari standar nasional (66,53 pada tahun 2010 ke 71,39 pada tahun 2018) walaupun dengan catatan baik: persentase pertumbuhan IPM provinsi NTB telah melebihi rata-rata nasional selama delapan tahun terakhir. Tetap, latar belakang IPM provinsi NTB ini menjadi salah satu faktor inti pendorong pemerintah provinsi NTB di era Dr. Zulkieflimansyah untuk mencari solusi meningkatkan IPM provinsi NTB secara maksimal dalam waktu sesegera mungkin, yaitu lima tahun sesuai dengan RPJMD 2019-2023 yang telah diresmikan (Riadi, 2019).

Dengan adanya hubungan kerja sama luar negeri antara NTB dan pemerintah daerah di negara asing, pemerintah daerah mengharapkan bahwa keberadaan hubungan positif yang berbentuk *sister province* dalam sektor pendidikan dan investasi dapat meningkatkan kualitas IPM dan sumber daya manusia NTB serta menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat NTB melalui pelatihan intensif dan pengadaan investasi dalam berbagai bidang. Seperti yang diketahui, pariwisata telah menjadi salah satu fokus pembangunan perekonomian utama di NTB dengan adanya KEK Mandalika. Akan tetapi, investasi yang direncanakan diterima oleh pihak pemerintah Provinsi NTB juga mencakup banyak sektor, di antaranya adalah sumber energi terbarukan dan pengolahan

biomass (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2018).

- Diaspora Generasi Muda NTB dan Promosi NTB dan Indonesia secara Global

Diaspora dapat diartikan sebagai suatu kelompok masyarakat yang diidentifikasi melalui adanya identitas atau karakteristik tertentu (ras, warna kulit, bahasa, dll.) yang menempati suatu daerah di luar “daerah asal” mereka. Menurut KBBI, diaspora dapat diartikan sebagai “masa tercerai berainya suatu bangsa yang tersebar di seluruh penjuru dunia”. Penjelasan mengenai diaspora kemudian dilanjutkan oleh Stuart Hall (2014) dengan pernyataan bahwa diaspora pada dasarnya merupakan perjuangan politik identitas suatu ras di luar “daerah asal” dan pada umumnya untuk melawan apa yang disebut sebagai rasisme. Hall banyak mengutarakan pendapat mengenai diaspora berdasar pada pengalaman ras Afrika yang identik dengan “kulit hitam” dan Asia dengan “kulit kuning” yang tersebar di berbagai belahan dunia, seperti Jamaika, Inggris, dan beberapa negara lainnya pada pertengahan abad ke-20. Diaspora ini, meskipun dianggap merupakan representatif dari ras mereka di tempat asal, ada kalanya membentuk suatu identitas mereka sendiri yang hanya ada di daerah perantauan; hal ini sering dikemukakan sebagai proses “belajar” dan “pemersatu” orang-orang dengan ciri-ciri ras tertentu (seperti orang Afrika di Amerika yang menemukan “identitas” sendiri melalui musik).

Masyarakat Indonesia, khususnya provinsi Nusa Tenggara Barat, sering memahami makna diaspora sebagai “perantauan” atau “merantau” yaitu fenomena keturunan Indonesia atau ras/suku tertentu yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pergi meninggalkan kampung halamannya dengan tujuan mencari penghidupan, pendidikan, keamanan, dan berbagai alasan lainnya. Makna “merantau” bagi masyarakat Indonesia tidak hanya terbatas pada perginya keturunan masyarakat mereka ke luar negeri; “merantau” juga dapat dilakukan jika keturunan suatu masyarakat pergi dan meninggalkan suatu daerah dalam lingkup Indonesia yang memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda dengan tempat asalnya. Dengan harapan bahwa para “perantau” dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang lebih dari yang mampu mereka dapatkan di tempat asal, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat NTB dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yaitu mereka sendiri dengan menimba ilmu di luar negeri yang pastinya memiliki karakter fisik, budaya, serta kualitas pendidikan yang berbeda dan lebih maju dari yang ada di NTB.

Pada hampir setiap kesempatan dalam kuliah umum, upacara, maupun rapat, Dr. Zulkiefliimansyah menurut keterangan para narasumber tetap memberikan arahan untuk meningkatkan mutu SDM yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat melalui pendidikan kepada seluruh pejabat yang berada di jajaran beliau (Hazbulwadi, 2019). Penulis berpendapat bahwa

pemaparan ide oleh gubernur melalui cara ini merupakan upaya sinkronisasi rutin visi dan misi seluruh instansi pemerintah dengan harapan bahwa seluruh pihak paham dan bersedia mendukung visi dan misi pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam periode ini tanpa adanya paksaan. Salah satu dari poin yang sering ditekankan oleh Dr. Zul dalam setiap diskusi formal maupun nonformal selain pentingnya memajukan SDM melalui pendidikan adalah pentingnya persebaran generasi muda NTB atau diaspora NTB dalam memajukan daerah baik secara langsung dengan kembali ke kampung halaman untuk membangun perekonomian daerah maupun tidak dengan membangun Indonesia di tempat lain di dalam maupun luar negeri (Mahdi, 2019).